**POLITIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN:
REVITALISASI UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN
KEAGAMAAN**

Abstrack

Ahmad Syafii

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
azfy99@gmail.com

Siti Qurrotul A'yuni

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
sitiqurrotulayuni95@gmail.com

Indonesia is the biggest archipelago country in the world, the government has tried to prosper the people by issuing policies on regional autonomy. Regional autonomy in its development is widespread in all fields, one of them in education. Autonomy Education gained much support among the people, thus giving birth to Decentralization of Education, namely to give up government responsibility according to the needs and capabilities of each region. The effort has been regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System supported by Government Regulation no. 55 of 2007. However, these efforts have not been fully realized, so that sometimes cause gap and prolonged criticism. Therefore we as a policy-bearer must prioritize the principle good governance in Decentralization of Education.

The religious and religious education policies contained in Government Regulation No. 55 of 2007 are intended to help realize the goals of education in Indonesia, giving the right of autonomy in the form of decentralization of education to each school in each region to manage the institution. If the school is religious based, it is given the freedom to manage according to the teachings of the religion. But to realize this policy requires strong observers and willing to act, the principle of autonomy, flexibility, participatory and initiative can be used as a basis in realizing these goals as a whole.

Keyword: Decentralization, Religious Education

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan multikultur terbesar di dunia. Tiada satu pun negara dengan pluralitas masyarakat sebanyak Indonesia. Keragaman bahasa, budaya, ras, suku, dan agama, serta kepercayaan. Jumlah dari keragaman tersebut akan menjadi aset kekayaan sepanjang masa jika dikelola dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan pendidikan dari masyarakat tersebut.

Pendidikan dalam arti sederhana merupakan usaha manusia untuk manusia dalam membina kepribadian agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat kebudayaan (Hasbullah, 2006: 1). Pendidikan selalu menjadi topik hangat yang diperbincangkan. Pasalnya dunia pendidikan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi bagi setiap individu. Layaknya makanan pokok, pendidikan adalah konsumsi wajib bagi setiap anak bangsa, terkhusus bangsa Indonesia. Jika Indonesia memiliki cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsanya, maka sepatutnya dengan gigih merealisasikan apa yang dicita-citakan, bukan hanya sebagai *utopisme* belaka.

Kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 dimaksudkan untuk membantu mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia, memberikan hak otonomi berupa desentralisasi pendidikan kepada masing-masing sekolah ditiap-tiap daerah untuk mengelola lembaga tersebut. Jika sekolah tersebut berbasis keagamaan, maka diberi kebebasan mengelola sesuai dengan ajaran agama tersebut. Akan tetapi untuk merealisasikan kebijakan tersebut memerlukan pemerhati kuat dan mau bertindak, prinsip otonomi, fleksibilitas, partisipatif dan inisiatif dapat dijadikan sebagai landasan dalam mewujudkan tujuan tersebut secara keseluruhan.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 1 ayat 2 dalam ketentuan umum mengamanatkan: “Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Berdasarkan pernyataan tersebut

pendidikan haruslah bersifat dinamis, dapat berubah dan diterima diseluruh kalangan masyarakat, namun tetap sesuai dengan koridor yang berlaku.

HASIL PENELITIAN

A. Hakikat Pendidikan di Indonesia

Proyeksi pendidikan di abad 21 salah satunya adalah pendidikan karakter, karakter yang moral dan karakter kinerja. Karakter moral ini sifatnya iman, taqwa, jujur, rendah hati. Sedangkan karakter kinerja ulet, tangguh, tak mudah menyerah tuntas. Kita tidak ingin seorang jujur tapi pemalas, atau pekerja keras tetapi cualas. Hal ini diungkapkan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam pidatonya ketika menghadiri acara Reuni Akbar Pesantren Islam Al-Irsyad yang digelar di asrama haji Pondok Gede Bekasi.

Unsur-unsur pendidikan di antaranya: usaha yang bersifat bimbingan, ada pendidik, ada yang dididik, bimbingan mempunyai dasar dan tujuan, ada alat-alat yang dipergunakan (Yunifah Retnowati, 2010: 202). Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh generasi potensial yang benar-benar memberikan secerca harapan bagi bangsa kedepan. Generasi potensial ini pada gilirannya akan menjadi pioner dalam pembangunan karakter (Muhammad Takdir Ilahi, 2012: 40). Pendidikan diharapkan dapat membentuk karakter anak-anak bangsa. Karakter merupakan indikator yang harus diperhatikan, karena dari karakter inilah seseorang dapat dinilai.

Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yang melibatkan aspek pengetahuan (*cognitive*), perasaan (*feeling*), dan tindakan (*action*). Jadi yang diperlukan dalam pendidikan karakter tidak cukup hanya dengan pengetahuan lantas melakukan tindakan yang sesuai dengan pengetahuannya saja. Hal ini karena pendidikan karakter terkait dengan nilai dan norma. (Akhmad Muhaimin Azzet, 2016: 27)

Wanda Cristiana mengatakan di dalam buku Zubaedi sebagai berikut: *Character determines someone's private thoughts and someone's action done. Good character is the inward motivation to do what is right, according to the highest standard of behavior in every situation* (Zubaedi, 2012: 9), artinya karakter

menentukan pikiran pribadi seseorang dan tindakan yang dilakukan seseorang. Karakter yang baik adalah motivasi batin untuk melakukan apa yang benar, sesuai dengan standar perilaku tertinggi dalam setiap situasi.

Menurut kemendiknas nilai-nilai luhur sebagai pondasi karakter bangsa yang dimiliki setiap suku di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

NILAI	DESKRIPSI
1. Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2. jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3. Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4. Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan
5. Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaikbaiknya.
6. Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7. Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8. Demokratis	Cara berfikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9. Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.
10. Kebangsaan	Cara berfikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11. Cinta Tanah Air	Cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa,

	lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12. Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
13. Bersahabat/Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14. Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15. Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya
16. Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17. Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18. Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Tabel 1. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. (Kementrian Pendidikan Nasional, 2010: 9-10)

Kebijakan pendidikan yang harus diutamakan adalah membantu setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal, yaitu dengan: (1) menyediakan guru yang profesional, yang seluruh waktunya dicurahkan untuk menjadi pendidik; (2) menyediakan fasilitas sekolah yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan penuh kegembiraan dengan fasilitas olahraga dan ruang bermain yang memadai; (3) menyediakan media pembelajaran yang kaya, yang memungkinkan peserta didik dapat secara terus menerus belajar melalui membaca buku rujukan, kelengkapan laboratorium dan perpustakaan yang memungkinkan peserta didik belajar sampai tingkatan menikmati belajar; (4) evaluasi secara komprehensif dan obyektif. (Syamsul Ma'arif, 2007: 125)

B. Definisi Pendidikan Agama dan Keagamaan

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 menjelaskan dengan sangat rinci mengenai Pendidikan Agama dan Keagamaan. Dalam penjelasan umum UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaharuan sistem pendidikan nasional adalah pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia. Selanjutnya UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama pada jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi dan khusus disebut “Pendidikan Agama”. Penyebutan ini dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran/kuliah. (<https://kemenag.go.id>, 10 April 2018)

Selanjutnya UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Ketentuan ini setidaknya mempunyai 3 (tiga) tujuan, yaitu pertama, untuk menjaga keutuhan dan kemurnian ajaran agama; kedua, dengan adanya guru agama yang seagama dan memenuhi syarat kelayakan mengajar akan dapat menjaga kerukunan hidup beragama bagi peserta didik yang seagama menunjukkan profesionalitas dalam penyelenggaraan proses pembelajaran pendidikan agama. (<https://kemenag.go.id>, 10 April 2018)

Pendidikan keagamaan pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah jauh berkembang. Jika diamati secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar.

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan merupakan kesepakatan bersama pihak-pihak yang mewakili umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Pendidikan Diniyah, Pesantren dan Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam. Pasraman dan Pesantian adalah satuan pendidikan keagamaan Hindu. Pabbajja

samanera adalah satuan pendidikan keagamaan Buddha. Shuyuan adalah satuan pendidikan keagamaan Khonghucu. (<https://kemenag.go.id>, 10 April 2018)

Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa pendidikan agama adalah mata pelajaran/mata kuliah dari agama yang diajarkan, sedangkan pendidikan keagamaan adalah lembaga yang menaungi pendidikan agama, seperti madrasah, pesantren dalam agama Islam dan lainnya.

C. Perhatian Pemerintah dalam Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Pendidikan agama di Indonesia sebenarnya sudah ada jauh sebelum kemerdekaan. Namun oleh karena politik pemerintahan penjajah, maka di sekolah-sekolah negeri tidak diberikan pendidikan agama. Pendidikan agama dianggap tanggung jawab keluarga. Setelah Indonesia merdeka, para pemimpin dan perintis kemerdekaan menyadari bahwa betapa pentingnya pendidikan agama. Ki Hajar Dewantara, Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada kabinet pertama menyatakan dengan tegas bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah negeri. (Abdul Rachman Shaleh, 2000: 9)

Menengok kembali pada sejarah yang ada, betapa banyak perubahan yang terjadi. Perubahan tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman yang terjadi, karena ilmu pengetahuan bersifat dinamis. Kebijakan pemerintah terus diubah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Harapan yang semoga dapat terwujud ini tidak hanya meningkatkan kualitas dibidang ilmu pengetahuan saja, melainkan moralitas juga perlu dikedepankan.

Adapun kebijakan Sistem Pendidikan Nasional yang dikeluarkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tersebut merupakan pengganti UU SPN Nomor 2 Tahun 1989 yang sudah tidak relevan lagi dengan semangat reformasi otonomi daerah, karenanya UU SPN Nomor 2 Tahun 1989 harus diperbarui dan diganti. (Imam Machali dan Ara Hidayat, 2016: 51)

Dulu sebelum diberlakukan otonomi masyarakat tidaklah dapat berbuat banyak untuk perkembangan di daerahnya baik dibidang pemerintahan maupun dibidang pendidikan, bahkan masyarakat hampir sama sekali termarginalkan. Semua kebijakan-kebijakan bermuara dari pusat. Pusatlah yang menentukan baik dan buruknya daerah daerah yang ada di Nusantara ini. Padahal Pemerintah pusat

tidaklah mengetahui bagaimana kondisi riil di daerah yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Kemudian muncul otonomi daerah yang mana merupakan pemberian kekuasaan kepada daerah masing-masing untuk membuat kebijakan (desentralisasi).

Pengertian otonomi dalam konteks desentralisasi pendidikan, menurut Tilaar mencakup enam aspek, yakni: (1) Pengaturan perimbangan kewenangan pusat dan daerah, (2) Manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan, (3) Penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah, (4) pemberdayaan bersama sumber daya pendidikan, (5) hubungan kemitraan “*stakeholders*” pendidikan; (6) pengembangan infrastruktur sosial. (Mahmud MY, 2018)

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 adalah terungkap pada Bab Hak dan Kewajiban Warga Negara, Orang tua, Masyarakat dan Pemerintah. Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan; Pasal 9 Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”. Begitu juga pada bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pasal 11 ayat (2) “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun”. Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, pasal 24 ayat (2) “Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat” (<http://kelembagaan.ristekdikti.go.id>, 13 April 2018).

Pada dasarnya otonomi juga berarti mampu untuk menentukan sendiri keinginan dan kebutuhannya sendiri yang dipandang sesuai dengan keberadaannya selaku insan atau instansi yang bebas mengatur dirinya sendiri (Marus Suti, 2011: 2-3). Otonomi pendidikan memberikan kebebasan terhadap suatu lembaga di suatu daerah dalam mengelola sesuai kemauan dan kebutuhan lembaga atau daerah tersebut.

Munculnya UU SPN Nomor 20 Tahun 2003 yang menguatkan Otonomi Pendidikan (Desentralisasi Pendidikan) ini kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah baru Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) UU No 20 Tahun 2003 sehingga perlu menetapkan peraturan ini.

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) memaparkan “Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/mata kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian pada pasal 1 ayat (2) diterangkan “Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang agama dan /menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. (<https://kemenag.go.id>, 10 April 2018)

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk: pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pesantian, pabbajja samanera, dan bentuk lain yang sejenis (Imam Machali dan Ara Hidayat, 2016: 50). Pada bagian umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 dipaparkan lembaga pendidikan keagamaan dari masing-masing agama yang diakui di Indonesia, mulai dari agama Islam, Hindu, Kristen, Budha, dan Konghucu.

D. Desentralisasi Kebijakan Pendidikan

Otonomi diberikan kepada sektor pendidikan maka lembaga pendidikan tersebutlah yang wajib mengolah. Sekolah pun harus mendengarkan masukan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Masukan ini lalu menjadi bagian dari sistem pengajaran dan pendidikan yang lebih luas, sehingga pada akhirnya pendidikan tumbuh sebagai proses dialektika antara sistem dan masyarakat. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan tersebut dikeluarkan melalui

kebijakan desentralisasi pendidikan atau Decentralized Basic Education Project (DBEP). (Ujang Didi Supriyadi, 2009: 38).

Dalam paradigma sentralistik, pemerintah pusat mendominasi proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi sehingga pusat menjadi pemain utama dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan dari sentralistik ke sistem pemerintahan desentralistik ditandai oleh lahirnya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang sekarang menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Perubahan paradigma ini tentunya melalui dinamika dan proses politik. (Sitta Aulia, 2012: 205)

Desentralisasi menurut Rondinelli dalam Abu-Duhou mempunyai empat bentuk yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi (Imam Machali dan Ara Hidayat, 2016: 54). Dari keempat bentuk tersebut menjadi model desentralisasi di Indonesia yang sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004, yang mana desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Model ini memiliki konsekuensi tanggung jawab atas apa yang telah diputuskan. (Imam Machali dan Ara Hidayat, 2016: 54-56)

Secara konseptual, terdapat dua jenis desentralisasi pendidikan, yaitu: 1) desentralisasi kewenangan di bidang pendidikan dalam hal kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan 2) desentralisasi pendidikan dengan fokus pada pemberian kewenangan yang lebih besar di tingkat sekolah. Konsep yang pertama berkaitan dengan otonomi daerah dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan dari Pusat ke daerah, sedangkan konsep ke-2 memfokuskan pada pemberian kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah dilakukan dengan motivasi untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan. (Subijanto, 2010: 534)

Jenjang pendidikan	Usia sekolah	Departemen pendidikan dan kebudayaan				Kementerian agama								
						PAI pada Satuan Pendidikan			Pendidikan Umum Formal Berciri Islam	Pendidikan Keagamaan				
		Formal		Nonformal						Diniyah			Pesantren	
							Nonformal				Nonformal			
		Akademik	Profesional	Berjenjang	Nonjenjang	Formal	Berjenjang	Nonjenjang		Formal	Berjenjang	Nonjenjang	Formal	Nonformal
		Program Strata 3 (S-3)	Program Profesional Tingkat 2	Program Mandiri, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Kepemudaan, Keaksaraan, Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pengembangan Budaya Baca, Pendidikan Keagamaan	MK PAI PT		MP PAI pada PNF, Program Mandiri dan Program Terintegrasi	Program Strata 3 (S-3)	Ma'had Aly	Diniyah Taklimiyah	Majlis Ta'lim, Pengajaran Al-Qur'an, dan lain-lain		Ma'had Takhassus	
		Program Strata 2 (S-2)	Program Profesional Tingkat 1					Program Strata 2 (S-2)						
Tinggi	24	Program Strata 1 (S-1)	Program Diploma (D-1 – D-4)					Program Strata 1 (S-1)						
	23													
	22													
	21													
	20													
	19													
Menengah	18	SMA/SMK	Kejar Paket C		MP PAI		MA	Pendidikan				Mu'adilah	Pengajian	
	17													

	16				MP PAI SMA/S MK/LB	Kejar Paket C			Diniyah Atas (PDA)	Diniyah Taklimiy ah Ulya			n Kiab Ulya
Dasar	15	SMP	Kejar Paket B	Program terintegrasi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdaya an perempuan	MP PAI SMP/LB	MP PAI Kejar Paket B		MTs	Pendidik an Diniyah Meneng ah Pertama (PDMP)	Diniyah Taklimiy ah Wustha		Wajar Dikdas Salafiy ah	Pen gajia n Kita b Tsan awi
	14												
	13												
	12	SD	Kejar Paket A		MP PAI SD/LB	MP PAI Kejar Paket A		MI	Pendidik an Diniyah Dasar (PDD)	Diniyah Taklimiy ah Awwaliy ah			
	11												
	10												
	9												
	8												
7													
PAUD	6	TK	Keluarg a Bermai n	MP PAI TK	MP PAI	RA/BA		TKA/TK Q					
	5		Bina Keluarg a Balita										

	4		Dan Lain- lain										
--	---	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Gambar 1: Peta Program Struktur Pendidikan dan Lembaga Pendidikan Islam. (Imam Machali dan Ara Hidayat, 2016: 55)

Desentralisasi juga didasarkan pada keinginan untuk menciptakan demokrasi, pemerataan, efektivitas, dan efisiensi. Implikasinya langsung dari kebijakan ini adalah bahwa semua kebijakan publik harus lebih banyak berasal dari bawah/masyarakat (*bottom-up*) dan bukan lagi dari atas yaitu pemerintah (*top-down*). Keterlibatan masyarakat, baik sebagai pelaku dan subjek, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sampai pemanfaatan sesuatu yang berkaitan dengan publik harus demokratis dan sesuai dengan kebutuhan warga. (Imam Machali dan Ara Hidayat, 2016: 55)

Desentralisasi pendidikan yang dilakukan di berbagai negara merupakan bagian dari proses reformasi pendidikan secara keseluruhan dan tidak sekedar merupakan bagian dari proses otonomi daerah dan desentralisasi keuangan. Lebih lanjut, desentralisasi pendidikan merupakan proses pemberian kewenangan yang lebih luas di bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar diberikan pula kepada sekolah dalam bentuk manajemen berbasis sekolah (MBS). (Subijanto, 2010: 534)

E. MBS/MBM (Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah) Sebagai bentuk Otonomi Pendidikan

Manajemen berbasis sekolah adalah salah satu bentuk desentralisasi pendidikan, yang semula sekolah hanya merupakan perpanjangan tangan birokrasi pemerintah pusat untuk penyelenggaraan urusan politik pendidikan dan para pengelola sekolah sama sekali tidak memiliki kelonggaran dalam mengoperasikan sekolahnya secara mandiri. Karena semua kebijakan dari penyelenggaraan pendidikan sekolah umumnya diadakan di tingkat pusat dan mengarah secara vertikal ke bawah.

Manajemen berbasis sekolah mengandung pengertian desentralisasi yang sistematis pada otoritas dan tanggung jawab tingkat sekolah untuk membuat keputusan atas masalah signifikan terkait penyelenggaraan sekolah dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh pusat terkait tujuan, kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas. (Asbin Pasaribu, 2017: 13)

Menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah, maka pihak sekolah memiliki hak otonomi yaitu hak atau kewenangan sekolah dalam mengatur dan mengurus kepentingan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan serta dapat menciptakan mutu pendidikan yang baik. Tujuan ini ditentukan berdasarkan penataan dan pengkajian terhadap situasi dan kondisi organisasi, seperti kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. (Nanang Fattah, 2008:15)

MBS/MBM merupakan paradigma baru dalam manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah/madrasah, dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Pemberian otonomi agar sekolah/madrasah leluasa mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikan sesuai prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Kewenangan pengelolaan pendidikan kepada pihak sekolah atau madrasah ini juga disebut *local managemen of school*. (Imam Machali dan Ara Hidayat, 2016: 58)

F. Upaya Akademisi dalam Merevitalisasi Kebijakan Pendidikan Keagamaan

Sebagai masyarakat akademisi menggiatkan kembali kebijakan yang telah dibuat pemerintah berupa Desentralisasi Pendidikan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional dapat dilalukan dengan menanamkan pengelolaan pembangunan yang *good governance*, diantaranya dengan menjadikan prinsip Manajemen Berbasis Madrasah sebagai landasan, yaitu otonomi, fleksibilitas, partisipatif, dan inisiatif. Prinsip ini tertulis dalam Depdiknas yang diterbitkan tahun 2007, berikut penjabarannya:

1. Otonomi, diartikan sebagai kemandirian (pengelolaan mandiri). Kemampuan memecahkan persoalan-persoalan sekolah, kemampuan bersinergidan kolaborasi, dan memenuhi kebutuhan sendiri.
2. Fleksibilitas, keluesan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, memberdayakan sumber daya seoptimal mungkin.
3. Partisipasi, penciptaan lingkungan yang demokraik, memanfaatkan warga sekolah dan masyarakat untuk ikut terlibat.

4. Inisiatif, meyakini bahwa manusia tidak statis melainkan dinamis, oleh karena itu memerlukan pendekatan pada pengembangan SDM. (Imam Machali dan Ara Hidayat, 2016: 59-60)

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan agama dan keagamaan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 dimaksudkan untuk membantu mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia, memberikan hak otonomi berupa desentralisasi pendidikan kepada masing-masing sekolah di tiap-tiap daerah untuk mengelola lembaga tersebut. Jika sekolah tersebut berbasis keagamaan, maka diberi kebebasan mengelola sesuai dengan ajaran agama tersebut. Akan tetapi untuk merealisasikan kebijakan tersebut memerlukan pemerhati kuat dan mau bertindak, prinsip otonomi, fleksibilitas, partisipatif dan inisiatif dapat dijadikan sebagai landasan dalam mewujudkan tujuan tersebut secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Sitta. “Desentralisasi Kebijakan Pendidikan (Studi Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Surabaya pada Tingkat Pendidikan Menengah dan Kejuruan) “, Jurnal Politik Muda, 2 (1), Januari-Maret 2012.
- Azzet, Akhmad Muhaimin. 2016. *Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Fattah, Nanang. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah. 2006. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kementrian Pendidikan Nasional. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa: Pedoman Sekolah*. Jakarta: Puskur Balitbang.
- Ma’arif, Syamsul. 2007. *Irevitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Machali, Imam dan Ara Hidayat. 2016. *The Hand Book Of Education Management Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Grup,
- Muhammad Takdir Ilahi. 2012. *Revitalisasi Pendidikan Berbasis Moral*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- MY, Mahmud, “Otonomi Pendidikan (Sebuah Tinjauan dalam Peran Masyarakat) diakses pada tanggal 13 April 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/56820-ID-otonomi-pendidikan-sebuah-tinjauan-terha.pdf>
- Pasaribu, Asbin. “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional di Madrasah”, Jurnal Edutech, 3 (1) Maret 2017.
- PP Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, <https://kemenag.go.id/file/dokumen/PP5507.pdf>. diakses pada tanggal 10 April 2018

- Retnowati, Yunifah. "Kreativitas Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7 (2) Desember, 2010: 1829-5764 .
- Shaleh, Abdul Rachman. 2000. *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi*. Jakarta: PT Gemawindu Pancaperkasa.
- Subijanto "Prinsip-Prinsip dan Efektivitas Desentralisasi Pendidikan Dalam Rangka Meningkatkan Mutu dan Relevansi Pendidikan", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 16, (5), September 2010,
- Supriyadi, Ujang Didi. "Pengaruh Desentralisasi Pendidikan Dasar Terhadap Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali", *Jurnal Kependidikan*, 1, Mei 2009
- Suti, Marus. "Strategi Peningkatan Mutu di Era Otonomi Pendidikan", *Jurnal MEDTEK*, 3 (2) Oktober 2011.
- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/UU_no_20_th_2003.pdf. diakses padatanggal 12 April 2018.
- Zubaedi. 2012. *Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.